

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan perhitungan tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota yang unggul di Provinsi NTT Tahun 2015-2017, tiga kabupaten dan kota yang unggul ini selalu mengalami pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang bersifat fluktuatif. Pada tahun 2015 tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota yang unggul di Provinsi NTT di Ungguli oleh Kabupaten Sikka dengan kriteria cukup berhasil dan diikuti oleh Kota Kupang dan Kabupaten Ngada dengan kriteria tidak berhasil. Ditahun 2016 tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah kabupaten dan kota yang unggul di Provinsi NTT semuanya sangat merosot dan kriterianya tidak berhasil akan tetapi Kabupaten Ngada mengalami pertumbuhan yang positif, sedangkan Kota Kupang dan Kabupaten Sikka mengalami pertumbuhan yang negative. Dan di tahun 2017 tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah kabupaten dan kota yang unggul di Provinsi NTT mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yakni diungguli oleh Kota Kupang dengan kriteria kurang berhasil dan diikuti oleh Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sikka dengan kriteria tidak berhasil.

2. Berdasarkan pengukuran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) tiga kabupaten dan kota yang unggul di Provinsi NTT tahun 2015-2017 di atas dan diklasifikasikan menurut Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah, ketiga daerah ini memiliki tingkat kemampuan keuangan yang tinggi. Maka kemampuan keuangan daerah yang berada di posisi teratas berturut-turut Kabupaten Ngada, Kota Kupang dan Kabupaten Sikka. Hal ini akan memperkuat ketahanan keuangan masing-masing daerah dalam menghadapi krisis yang dapat terjadi di luar prediksi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat saran yang diberikan antara lain :

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTT, diharapkan untuk melakukan penilaian dan mengevaluasi serta menambah kualitas sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota yang unggul di Provinsi NTT dan juga daerah kabupaten lainnya yang belum maksimal dalam mengelola keuangan daerahnya dengan cara meningkatkan program-program yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman dan membuat masyarakat lebih berkontribusi terhadap pembangunan daerah untuk meningkatkan Indeks Kemampuan Keuangan Kab/Kota di Provinsi NTT.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang unggul di Provinsi NTT, diharapkan terus mengupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yaitu dengan intensifikasi pajak merupakan upaya mengefisienkan kembali potensi objek pajak, hal ini dapat dilakukan melalui dinas yang berwenang seperti Dinas Pendapatan Daerah.

Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas atau mutu sumber daya manusia (SDM) seperti pegawai, pemanfaatan sarana prasarana lingkungan kerja ataupun peningkatan pelayanan publik untuk masyarakat yang memadai, peningkatan administrasi pajak seperti penyempurnaan data potensi pajak dan struktur kerja yang jelas, penyempurnaan undang-undang pajak yang mengatur tentang pajak dan retribusi kabupaten/kota Provinsi NTT khususnya daerah unggul tanpa membuat masyarakat terbebani akan peraturan tersebut serta kerja sama antara pemerintah daerah masing-masing dengan masyarakat maupun instansi lain. Sedangkan ekstensifikasi pajak merupakan upaya memperluas objek dan subjek pajak yang dapat dijadikan potensi penerimaan daerah.

Strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang unggul di Provinsi NTT adalah menggali potensi penerimaan untuk menarik investor ke daerah masing-masing disertai sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten/Kota yang unggul di Provinsi NTT mulai dari sektor pariwisata (eksplorasi laut, gunung, hewan dan tumbuhan), pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan serta sektor budaya dan industry yang berpotensi untuk digali dalam upaya meningkatkan

penerimaan daerah berupa pajak oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang unggul di Provinsi NTT.

Penyebaran informasi, kemudahan birokrasi, serta peraturan daerah tentang pajak dan retribusi seperti penyesuaian tarif pajak, proses pengawasan pungutan pajak, sanksi untuk wajib pajak maupun petugas, penyempurnaan data untuk pengidentifikasian objek pajak baru, menciptakan peluang usaha yang baru untuk masyarakat sehingga timbul objek pajak yang baru, penerbitan obligasi daerah untuk membiayai kegiatan investasi dan pelayanan publik serta memaksimalkan penerimaan dari setiap transaksi ekonomi merupakan beberapa upaya ekstentifikasi pajak yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota yang unggul di Provinsi NTT.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Pengeluaran 2012-2016*.<https://ntt.bps.go.id>, diakses pada 26 September 2018 pukul 20.13.
- BPS, 2017. *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT (Persen),2012-2015*.<https://ntt.bps.go.id>, diakses pada 26 September 2018 pukul 22.03.
- De Rosary Ebed, 2017. *Target PAD Kab. Sikka, tak pernah tercapai*.<https://www.cendananews.com/2017/03/target-pad-kabupaten-sikka-tak-pernah-tercapai.html>, diakses pada 6 oktober 2018 pukul 14.59.
- Halim Abdul, 2001. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Selemba Empat: Jakarta.
- Halim Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Halim Abdul,2007.*Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Halim Abdul, 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Imam Tolak, 2018. *Dispenda Kota Kupang Terus Alami Over Target PAD Setiap Tahun*.<http://suaraindonesia-news.com/disperda-kota-kupang-terus-alami-over-target-pad-setiap-tahun/>, diakses pada 28 juni 2018 pukul 11.38.
- Inka Syafitri Dhyni, 2016.*Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*.<http://eprints.ums.ac.id/43134/16/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, diakses pada 7 oktober 2018 pukul 19.55.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Penerbit UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

- Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Penerbit UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi: Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Mujiyati dan Abdul Aris, 2014. *“Perpajakan Kontemporer”*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Monica Michael, 2016. *Analisis Perbandingan Efektivitas, Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 7 Kota di Sumatera Barat*.<https://scholar.unand.ac.id>>Abstrak, diakses pada 5 juni 2018 pukul 20.03.
- Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015, *Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019*.
- Putry Nurrahman dan Abdullah, 2011. *Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bengkulu*. Jurnal Akuntansi, 1 No.
- Prayitno, Hadi. 1986. *Ekonomika Pembangunan*, Edisi 1, Yogyakarta: BPF.
- Prima, 2013. *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.<https://primalifejournal.wordpress.com/2013/03/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>, diakses pada 19 april 2018 pukul 16.42.
- Sinarwati, 2007. *Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar*.<https://www.researchgate.net>, diakses pada 3 juni 2018 pukul 08.15.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* ;Bandung.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta; Bandung.
- Susanto Hery, 2014. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat*.simpen.lppm.ut.ac.id, diakses pada 11 September 2018 pukul 11.08.
- Syahfitri Inka Dhyni, 2016. *Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah*.<https://eprints.ums.ac.id>, diakses pada 13 September 2018 08.05
- TaniAlo, 2017. *Pertumbuhan Ekonomi NTT 2016 Tercatat 5,18Persen, Lebih Tinggi dari Pertumbuhan Nasional*. <https://m.rri.co.id>, diakses pada 28 September 2018 pukul 11.19

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. *Tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta.*

Wikipedia, *Kabupaten Sikka.*

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sikka#Geografi, diakses pada 17 juli 2018 pukul 9.50.

Wikipedia, *Kabupaten Ngada.* https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ngada, diakses pada 17 juli 2018 pukul 10.05.

Xavier Ernesta Gama Caeiro, 2013. *Analisis Perbandingan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2009-2011*, Universitas Katolik Widya Mandira: Kota Kupang.